

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Idham Latif, (2022) Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu dengan Judul “Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di UPT PPKB Kecamatan Indramayu”

Keluarga berencana merupakan kebutuhan penduduk dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu implementasi program di bidang kesehatan adalah implementasi program Keluarga Berencana di Dinas PPKB yang bertujuan untuk memenuhi permintaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesejahteraan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270.203.917 jiwa, untuk mengendalikan penduduk, maka pemerintah melakukan implementasi program KB yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB serta mengendalikan kelahiran. Namun dalam pelaksanaan program, capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Indramayu dalam 4 tahun terakhir menunjukkan hasil yang relatif tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program KB (MKJP) di UPT Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Indramayu.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Informan berjumlah 6 orang pelaksana program di tingkat kabupaten dan kecamatan Indramayu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pelatihan yang diadakan oleh daerah, tidak ada tenaga khusus promotor, ketersediaan dana yang belum mencukupi khususnya untuk kegiatan BKR, BKB, dan BKL dan ketersediaan logistik sarana dan prasarana sudah mencukupi. Pada penyuluhan dilakukan setiap saat dengan mendatangi kerumunan WUS di Sekolah Dasar, PAUD, Jamiaan, dan Posyandu. PLKB melakukan pembuatan kelompok kecil dengan sasaran WUS, Catin, dan remaja. Implementasi pelaksanaan MOP dan MOW belum maksimal. Pencapaian MKJP masih belum mencapai target, akseptor KB lebih banyak menjangkau kaum perempuan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kurang maksimal.

2. **Erni Yunita, (2023) Program Studi S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan judul “Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara”.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui teknik purposive sampling yang berjumlah 13 orang Informan. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) cukup terimplementasi dengan baik. Dapat dilihat pertama, Kemampuan Organisasi yaitu indikator kemampuan teknis cukup berjalan dengan baik karena masih pihak pelaksana seperti SubPPKBD belum terlalu terampil dalam penyampaian program KB. Kedua, Informasi yaitu indikator transmisi dan kejelasan informasi kurang berjalan dengan baik karena penyampaian informasi hanya dilakukan satu kali satu bulan di kegiatan tribina. Ketiga, dukungan yaitu indikator sikap menerima/menolak dan partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat masih banyak yang menolak dan kurangnya dukungan suami untuk ikut menggunakan KB MKJP. Keempat, Pembagian potensi yaitu indikator pembagian wewenang dan tanggung jawab cukup berjalan dengan baik karena tidak pembagian khusus untuk KB MKJP.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di UPT PPKB Kecamatan Indramayu Tahun 2022	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MKJP ini masih kurang maksimal. Pencapaian MKJP masih belum mencapai target, akseptor KB lebih banyak menjangkau kaum perempuan, PLKB melakukan pembuatan kelompok kecil dengan sasaran WUS, Catin, dan Remaja.	Perbedaanya terletak pada Lokasi Penelitian, Teori yang dipakai George C. Edward III, Sedangkan Peneliti menggunakan Teori Van Metter & Van Horn.
2.	Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2023	Kualitatif Deskriptif	Implementasi Program MKJP sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya pelaksana, minimnya penyampaian informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan suami	Perbedaanya terletak pada Lokasi Penelitian.

(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2026)

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004).

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan tindakan dari individu, kelompok, maupun lembaga terkait agar kebijakan atau program dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat” Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu kebijakan publik, yaitu:

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah pindah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- 5) Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendefinisian oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa:

- 1) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara atau administrator publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah,
- 2) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administrator publik.
- 3) Dikatakan atau disebut sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan guna mencapai tujuan kebijakan tersebut. Tahap

ini merupakan bagian dari siklus kebijakan yang berada setelah perumusan dan penetapan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik melibatkan interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran (target group). Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta dukungan masyarakat.

Menurut Ripley dan Franklin (1986), implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sebagai proses administratif dan sebagai proses politik. Sebagai proses administratif, implementasi menekankan pada kepatuhan pelaksana terhadap aturan dan prosedur. Sedangkan sebagai proses politik, implementasi dipandang sebagai arena interaksi berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menerjemahkan kebijakan yang bersifat normatif ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

d. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter & Carl van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam

hubungan dengan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja-kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public, yaitu:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolik.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

2) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berperspektif topdown dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten

b) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya

merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan.

c) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi biasa

d) Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan

menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model yang dibahas oleh Merilee S. Grindle (1980) Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - 1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

e. Karakteristik Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- 1) Melibatkan banyak aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.
- 2) Memerlukan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan sarana prasarana.
- 3) Bersifat dinamis, karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- 4) Berorientasi pada tujuan, yaitu pencapaian hasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Program

a. Pengertian Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir, dan sistematis. Dalam konteks administrasi publik, program menjadi bentuk operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Secara umum, program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Program memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme pelaksanaan yang terstruktur.

Menurut Jones (1996), program adalah seperangkat kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan suatu kebijakan dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Sementara itu, Hasibuan (2006) menyatakan bahwa program merupakan rencana konkret yang berisi langkah-langkah operasional untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dalam perspektif kebijakan publik, program merupakan tahapan implementatif dari kebijakan. Artinya, kebijakan yang bersifat normatif dan umum akan diwujudkan melalui program-program yang lebih teknis dan aplikatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan instrumen atau alat kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir, dan sistematis. Program menjadi bentuk operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan sasaran, indikator, serta pemanfaatan sumber daya yang jelas agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Program Keluarga Berencana (KB)

a. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga guna mencapai tujuan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sebagai ini, KB merupakan kepedulian dan peran serta masyarakat. Selain itu, Keluarga Sejahtera (KS) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan material dan spritual, memiliki hubungan dekat dengan Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat, dan lingkungan.

Hanafi Hartanto (1994:08) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Keluarga Berencana (KB) adalah usaha manusia untuk mengembangkan rasa memiliki dalam kelompoknya, selain mempunyai definisi dalam undang-undang. Sesuai dengan hukum agama, hukum nasional, dan moralitas pancasila, dengan tujuan mencapai kesejahteraan keluarga dan bangsa secara umum dan khusus.

Keluarga Berencana (KB) merupakan inisiatif peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi landasan hukum utama program KB. Bab VI dari undang-undang tersebut, khususnya pasal 20 hingga pasal 29,

menyajikan ketentuan yang merinci keluarga berencana sebagai suatu kebijakan pemerintah. Keberlakuan program KB didasarkan pada prinsip membantu calon atau pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan dan realisasi hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Peraturan kebijakan KB mencakup berbagai aspek, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

KB menurut World Health Organization (WHO) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami-istri untuk menghindari kelahiran tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Setyani, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Program KB bertujuan untuk menciptakan kualitas keluarga yang lebih baik sehingga mampu mendukung pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

b. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan program Keluarga Berencana memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

- 1) Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak

- 2) Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut
- 3) Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua
- 4) Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini
- 5) Menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Adapun tujuan lain program keluarga berencana (KB) yaitu:

- 1) Output utama dari program ini adalah pasangan subur (PUS), bertujuan untuk mengurangi angka penuaan melalui penerapan kontrasepsi secara sistematis.
- 2) Strategi ini tidak bersifat pasif, meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan KB, yang bertujuan untuk memperpendek usia pensiun melalui penyelenggaraan kebijaksanaan kependudukan terpadu, guna mewujudkan kelompok yang berkualitas dan kompak.

c. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki manfaat untuk keluarga di antaranya sebagai berikut.

- 1) Menjaga kesehatan ibu dan bayi

Program Keluarga Berencana (KB) dapat memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga Kesehatan ibu dan bayi, baik itu pra ataupun pasca melahirkan. Hal ini disebabkan karena program kehamilan yang direncanakan dengan

matang dan baik akan memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan bayi.

2) Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak

Melalui pengaturan jarak kelahiran, orang tua memiliki waktu yang cukup untuk memberikan ASI eksklusif dan perhatian yang maksimal kepada anak. Jarak kelahiran yang ideal, yaitu sekitar 3–5 tahun, juga mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Dengan jumlah anak yang direncanakan sesuai kemampuan keluarga, kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya dapat dipenuhi dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

4) Membantu Perencanaan Ekonomi Keluarga

Program KB membantu keluarga mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak sehingga pengeluaran rumah tangga dapat direncanakan dengan lebih baik. Kondisi ini memungkinkan keluarga mengelola keuangan secara lebih efektif dan mencapai kesejahteraan ekonomi.

5) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak

Jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan orang tua memungkinkan setiap anak memperoleh perhatian, kasih sayang, serta kesempatan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian,

perkembangan dan masa depan anak dapat dipersiapkan secara optimal.

6) Mewujudkan Keluarga Yang Berkualitas

Program KB berperan dalam menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Melalui perencanaan kehamilan yang baik, orang tua dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara lebih optimal sehingga kualitas hidup keluarga meningkat.

d. Faktor-faktor Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut Juliantoro (2000:26), faktor-faktor seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan diidentifikasi sebagai pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB).

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB tidak dipengaruhi oleh tingkat perekonomian masyarakat secara umum, yang erat kaitannya dengan kemampuan mereka dalam membeli alat kontrasepsi.

4. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

a. Pengertian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang dapat digunakan dalam waktu relatif lama. Metode kontrasepsi yang termasuk dalam MKJP adalah IUD, implan, dan kontrasepsi mantap (Kemenkes RI, 2020). Metode kontrasepsi jangka

panjang (MKJP) sangat membantu menurunkan angka kematian ibu dan kehamilan yang tidak diinginkan (Kemenkes RI, 2020). Beberapa arahan kebijakan dalam rangka menciptakan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan keluarga kecil yang berkualitas sebagai sasaran program KB yaitu peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka waktu panjang. Kegiatan KB sementara ini masih kurang dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2015), MKJP adalah metode kontrasepsi yang mampu memberikan perlindungan terhadap kehamilan dalam jangka waktu panjang serta penggunaannya tidak memerlukan pengulangan dalam waktu singkat.

Hartanto (2010) menyatakan bahwa MKJP merupakan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk mencegah kehamilan yang meliputi alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD), implant, metode operasi wanita (MOW), dan metode operasi pria (MOP).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Saifuddin (2014) menjelaskan bahwa MKJP adalah metode kontrasepsi yang aman, memiliki masa kerja lama, serta tidak memerlukan kepatuhan penggunaan berulang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, MKJP menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang digunakan dalam jangka waktu lama, efektif, dan efisien untuk mencegah kehamilan. MKJP meliputi IUD/AKDR, implan, serta kontrasepsi mantap yang memiliki masa kerja panjang tanpa memerlukan penggunaan berulang dalam waktu singkat. Penggunaan MKJP bertujuan untuk mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana, menekan angka kelahiran, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

b. Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Menurut BKKBN, MKJP terdiri dari beberapa jenis metode, yaitu:

1) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

AKDR atau IUD merupakan alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. IUD bekerja dengan cara menghambat pergerakan sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. IUD memiliki masa kerja yang cukup lama, yaitu sekitar 5–10 tahun tergantung jenisnya.

2) Implant (Susuk KB)

Implant merupakan alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang ditanam di bawah kulit lengan atas wanita. Implant bekerja dengan cara melepaskan hormon progesteron yang berfungsi menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Masa kerja implant biasanya berlangsung selama 3–5 tahun.

3) Metode Operasi Wanita (MOW/Tubektomi)

MOW merupakan metode kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma. Metode ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi.

4) Metode Operasi Pria (MOP/Vasektomi)

MOP adalah metode kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma sehingga sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi. Metode ini aman, efektif, dan tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria.

c. Kelebihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

MKJP memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- 1) Memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan.
- 2) Dapat digunakan dalam jangka waktu lama.
- 3) Tidak memerlukan kepatuhan penggunaan secara rutin.
- 4) Lebih hemat biaya dalam jangka panjang.
- 5) Aman dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

d. Kekurangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Selain memiliki kelebihan, MKJP juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- 1) Pemasangan dan pelepasan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- 2) Membutuhkan prosedur medis tertentu.
- 3) Beberapa metode dapat menimbulkan efek samping seperti perubahan pola haid.

- 4) Metode sterilisasi bersifat permanen sehingga tidak dapat dikembalikan.

e. Tujuan Penggunaan MKJP

Penggunaan MKJP bertujuan untuk:

- 1) Mengendalikan angka kelahiran.
- 2) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- 3) Mendukung keberhasilan program keluarga berencana.
- 4) Mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini di jelaskan melalui teori yang dikemukakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Leo Agustino, 2022) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

